

EVALUASI PELATIHAN MELALUI *MOBILE TRAINNING UNIT* BERBASIS MASYARAKAT TERHADAP MINAT TUMBUHNYA MASYARAKAT DALAM MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA DI JAWA BARAT

Oleh :

Prof. Dr.H. Ali Anwar Yusuf, M.Si.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan lingkup wilayah studi adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Dalam hal ini mengingat Propinsi Jawa barat sebagai salah satu propinsi yang melaksanakan pelatihan melalui *Mobile Trainning Unit*. Kemudian Substansi kajian yang dibahas dalam penelitian ini pada dasarnya berkaitan dengan implementasi dan cara pandang pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan pembinaan pelatihan melalui *Mobil Training Unit* berbasis masyarakat di Jawa Barat. Pada konteks kerangka pikir yang melandasi penelitian itu adalah isu perubahan konsep pembangunan dari yang bersifat *top down* menjadi pendekatan yang bersifat *bottom up* yang senantiasa mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lingkup proses-proses pemberdayaan masyarakat. Tahap selanjutnya adalah memberikan keterampilan agar masyarakat bisa memanfaatkan potensi yang ada untuk kemajuan diri dan komunitasnya, serta diharapkan masyarakat menjadi terbiasa dalam menggunakan pendekatan-pendekatan dalam mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Kata Kunci : Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat

A. Pendahuluan

Pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam kehidupan masyarakat ini, pada hakikatnya merupakan usaha pengembangan kemampuan anggota masyarakat, sehingga kegiatan tersebut seharusnya mendapat dukungan dan peran serta aktif dari masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat sebagai pihak yang paling berkepentingan belum memahami secara betul makna dari program pelatihan yang dilaksanakan dan tidak memberikan tanggapan secara positif terhadap upaya-upaya yang dilakukannya, dapatlah dipastikan upaya tersebut tidak akan berdaya guna dan berhasil guna sesuai tujuan yang ingin dicapai. Disamping itupun, suatu bentuk kegiatan pelatihan perlu didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan peserta terhadap jenis kompetensi tertentu. Pelatihan harus dapat menjawab kebutuhan peserta sehingga nantinya akan bermanfaat untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dalam kehidupan masyarakatnya.

Disadari untuk melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan sebagaimana diharapkan tersebut, akan dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain : sistim penganggaran ; dan keterbatasan SDM ; sedangkan untuk melaksanakan identifikasi kebutuhan pelatihan

diperlukan SDM yang memahami tentang hal tersebut. Memperhatikan kecenderungan masalah tersebut, beberapa hal, mengenai program pelatihan yang dilaksanakan kurang sesuai dengan kebutuhan lapangan/masyarakat, kekurangan peserta pelatihan karena tidak diminati, semangat belajar peserta kurang karena tidak ada motivasi. Mencermati masalah tersebut, selanjutnya dikemukakan *Research Question* dalam penelitian ini sebagai berikut: **Bagaimana evaluasi pembinaan pelatihan melalui *Mobile Training Unit* berbasis masyarakat terhadap minat tumbuhnya masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja sendiri di Jawa Barat.**

Adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut: mengkaji sikap dan cara pandang masyarakat tentang keberlanjutan penerapan konsep pembinaan pelatihan melalui *Mobile Training Unit* berbasis masyarakat di Jawa Barat. Selain itupun, mengevaluasi pencapaian tahapan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan *Mobile Training Unit* terhadap tumbuhnya penciptaan lapangan kerja sendiri di Jawa Barat.

Landasan Pemikiran dan Metodologi

Kemudian, konteks tujuan penelitian itu, landasan pemikirannya bertolak ukur dari isu utama perubahan konsep pembangunan dari yang bersifat *top down* menjadi pendekatan yang bersifat *bottom up* yang senantiasa mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lingkup komunitasnya melalui proses-proses pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan dalam paradigma pembangunan masyarakat pada sebuah komunitas bisa dianggap sebagai konsep yang relatif lebih baik dan membawa manfaat yang lebih besar, namun dalam implementasinya masyarakat tidak akan serta merta ikut dan berpartisipasi penuh dalam program tersebut. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, yang oleh Sumaryadi (2005: 154-158) dijabarkan menjadi 8 faktor yang berpengaruh sebagai berikut: 1. Ketersediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapinya. 2. Pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang, dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri. 3.

Ketergantungan adalah budaya, dimana masyarakat sudah terbiasa berada dalam hirarki, birokrasi dan kontrol manajemen yang tegas sehingga membuat mereka terpola dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas. 4. Dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya, karena inti dari pemberdayaan adalah berupa pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat sendiri. 5. Adanya batas

pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan yang membutuhkan waktu relatif lama dimana pada sisi yang lain kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda. 6. Adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitasnya. 7. Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat. 8. Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya (*resource*) yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu.

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang berdaya, proses awal yang harus dilaksanakan adalah pelatihan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat, karena dari kondisi awal yang belum berdaya, masyarakat harus disadarkan terlebih dahulu tentang seluruh potensi dan kemampuan yang mereka miliki untuk kemudian diberikan pemahaman bahwa untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik hanya mereka sendiri yang bisa mengusahakannya karena merekalah yang mengetahui kebutuhan dan peluang-peluang yang ada.

Pemberdayaan melalui pelatihan merupakan penyadaran yang menekankan pentingnya suatu proses edukatif atau pembelajaran (dalam pengertian luas) dalam melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan mereka, sehingga masyarakat memiliki gagasan-gagasan, pemahaman, kosakata, dan keterampilan bekerja menuju perubahan yang efektif dan berkelanjutan. (Ife dan Tesoriero, 2008: 148 dan 350). Dalam tahapan pelatihan menurut (Gomes: 2003: 204) terdapat paling kurang tiga tahapan utama dalam yakni: penentuan kebutuhan pelatihan, desain program pelatihan, evaluasi program pelatihan. Sedangkan, pengembangan kapasitas di suatu komunitas masyarakat, harus disadari bahwa setiap masyarakat berbeda-beda. Mereka memiliki karakteristik budaya, geografi, sosial, politik, dan demografi yang unik, sehingga pengalaman pengembangan kapasitas di suatu komunitas masyarakat belum tentu dapat berjalan di masyarakat yang lain bahkan sangat beresiko mengalami kegagalan dan melemahkan pengalaman orang-orang dari masyarakat tersebut karena hal itu bukan proses yang cocok untuk mereka (Ife dan Tesoriero, 2008: 342).

Elemen-elemen dalam pengembangan kapasitas merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan dalam mencapai kondisi kapasitas masyarakat yang berkembang. Garlick dalam McGinty (2003) menyebutkan lima elemen utama dalam pengembangan kapasitas sebagai berikut: 1) Membangun pengetahuan, meliputi peningkatan keterampilan, mewadahi penelitian dan pengembangan, dan bantuan belajar, 2) Kepemimpinan, 3) Membangun jaringan, meliputi usaha untuk membentuk kerjasama dan aliansi, 4) Menghargai komunitas dan mengajak komunitas untuk bersama-sama mencapai tujuan, 5) Dukungan informasi,

meliputi kapasitas untuk mengumpulkan, mengakses dan mengelola informasi yang bermanfaat

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan metode deskriptif kualitatif, dimana analisis deskriptif merupakan analisis yang bertujuan untuk menyajikan gambaran yang menyeluruh suatu gejala atau peristiwa atau kondisi pada suatu objek penelitian, dalam hal ini adalah masyarakat, yang disusun dalam bentuk naratif (Patton, 2009).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan data di lapangan, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 1) **Wawancara Mendalam**, 2) **Pengamatan / observation** : a) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas, b) Keaktifan masyarakat dalam kegiatan pelatihan melalui Mobile Training Unit, 3) **Teknik survei / kuesioner**.

Adapun metode analisis dalam penelitian ini, yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif dan metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam analisis deskriptif kuantitatif ini, langkah awal setelah didapatkan data adalah pengolahan komponen data yang terdiri dari pengkategorian data awal, pengolahan data menggunakan teknik distribusi frekuensi melalui perhitungan statistika sederhana, mengukur sebaran data menggunakan perhitungan varian dan standar deviasi serta teknik pengontrolan data menggunakan teknik perhitungan *cross-tabulation*. Hasil perhitungan kuantitatif selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang menjadi bahan masukan bagi analisis selanjutnya yaitu analisis secara kualitatif. Alat-alat analisis yang digunakan dalam mengevaluasi proses pelatihan ini adalah menggunakan model pendekatan evaluasi Fujikake.

Pembahasan

1. Analisis Sikap dan Cara Pandang Masyarakat

a. Analisis Tanggapan Masyarakat

Analisis tanggapan masyarakat ini merupakan analisis dari nilai rata-rata jawaban setiap pertanyaan yang diajukan, dimana tanggapan masyarakat ini bisa dimaknai sebagai sikap dan cara pandang masyarakat terhadap pelaksanaan program pelatihan melalui Mobile Training Unit berbasis masyarakat. Tanggapan masyarakat terhadap program ini tergolong baik/tinggi, dengan nilai rata-rata 3.842 dari nilai skala 5.00.

Berdasarkan hasil analisis korelasi menggunakan analisis *chi-square* diketahui bahwa sikap dan cara pandang masyarakat terhadap pelaksanaan program pelatihan berbasis masyarakat secara umum tidak tergantung oleh perannya dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan dan golongan usianya, namun ada hubungannya dengan tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Masyarakat dengan tingkat pendidikan SD, SMA dan Sarjana merespon dan memberikan penilaian yang baik terhadap program pelatihan melalui Mobile Training Unit berbasis masyarakat, sedangkan tingkat tanggapan masyarakat yang tidak bersekolah cenderung sedang dan tinggi serta masyarakat lulusan SMP memberikan respon yang sedang. Dari perbedaan jenis kelamin juga terlihat bahwa kaum laki-laki memberikan respon yang baik terhadap program pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat, sedangkan kaum perempuan cenderung memberikan respon yang baik dan cukup.

Berdasarkan duabelas variabel dalam evaluasi pelatihan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagian besar memiliki keterkaitan dengan faktor gender, dimana sikap dan cara pandang masyarakat terhadap program pelatihan melalui Mobile Training Unit berbasis masyarakat masih ditentukan oleh jenis kelamin. Kaum laki-laki cenderung untuk memberikan tanggapan dan memberikan dukungan yang lebih besar dalam upaya untuk membangun masyarakat dikomunitasnya di bandingkan kaum perempuan.

b. Analisis Evaluasi Pembinaan Pelatihan Berbasis Masyarakat.

1) Analisis Perubahan Kesadaran Masyarakat

Perubahan kesadaran masyarakat lebih merupakan dampak dari serangkaian kegiatan pelatihan dan pembinaan pengembangan kapasitas masyarakat yang secara terus menerus dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan agenda pemberdayaan masyarakat yang lain. Analisis mengenai dampak dari pembinaan pelatihan melalui Mobile Training Unit ini tidak bisa dihitung berdasarkan peningkatan jumlah atau angka partisipasi, kuantitas finansial, maupun indikator-indikator fisik lainnya, tetapi lebih kepada pencapaian sasaran akhir program yang dapat diukur salah satunya dari peningkatan efektivitas dan efisiensi program yang dijalankan. Untuk itu tingkat perubahan kesadaran ini dapat dianalisis dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap kondisinya saat ini, tumbuhnya motivasi untuk melakukan perubahan menjadi kondisi yang lebih baik serta pengakuan terhadap hasil kegiatan yang telah mereka laksanakan sendiri.

Tingkat kesadaran masyarakat pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat terhadap masalah sumberdaya manusia dan kemiskinan di lingkungannya cukup tinggi. Kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap anggota komunitasnya disamping didorong oleh serangkaian kegiatan

pelatihan dan pembinaan pengembangan kapasitas masyarakat yang selama ini dilaksanakan juga didukung oleh basis nilai-nilai agama yang melekat kuat dalam masyarakat pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan program pelatihan dan pembinaan melalui Mobile Training Unit berbasis masyarakat, juga terlihat dari tingkat kekritisannya warga dalam menyampaikan usulan atau kritik terhadap program-program pelatihan dan pembinaan yang dijalankan. Meskipun apabila dilihat secara lebih dekat dapat diketahui bahwa warga sebagai peserta pelatihan yang kritis hanya personil itu-itu saja, namun adanya kelompok warga yang kritis bisa dijadikan sebagai pendorong dan pemacu serta sumber pembelajaran bagi anggota masyarakat yang lain untuk lebih peduli terhadap permasalahan dalam komunitasnya.

Motivasi masyarakat untuk melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih baik secara umum cukup tinggi, dimana masyarakat bersedia secara sukarela terlibat dan menjadi bagian dari program pelatihan dan pembinaan melalui Mobile Training Unit tanpa insentif apapun. Namun dilihat dari aspek kemandirian maka motivasi yang dimiliki masyarakat masih belum cukup kuat, hal ini dapat dilihat dari adanya keluhan terhadap berkurangnya peran fasilitatornya. Terjadi pengurangan jumlah fasilitator sehingga intensitas pertemuan dan interaksi antara fasilitator dengan masyarakat berkurang yang menyebabkan intensitas masyarakat untuk mengelola program juga berkurang, sehingga bisa dikatakan masyarakat masih belum cukup mandiri dan masih memerlukan dukungan dari pihak lain untuk menjaga agar motivasi yang dimiliki masyarakat tidak padam atau hilang.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil-hasil kegiatan pelatihan pembinaan melalui Mobile Training Unit berbasis masyarakat yang dilaksanakan cukup baik, disamping itu masyarakat juga menyatakan kepuasannya terhadap proses pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan. Pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan pelatihan melalui Mobile Training Unit berbasis masyarakat dirasakan dapat menumbuhkan kembali jiwa dan semangat gotong-royong dalam masyarakat yang selama ini mulai berkurang sehingga disamping kepuasan terhadap hasil pembinaan pelatihannya, juga proses selama pelaksanaannya tersebut. Bagi masyarakat di Kabupaten/Kota, keberadaan program pembinaan pelatihan melalui Mobile Training Unit bisa dianggap sebagai peluang untuk menyampaikan aspirasinya dalam bentuk usulan-usulan pembinaan yang relatif mudah untuk dapat terrealisasikan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses perencanaan dan pengakuan terhadap pembinaan

pelatihan melalui Mobile Training Unit yang dilaksanakannya. Dengan adanya motivasi dan pengakuan masyarakat terhadap proses pelaksanaan program pembinaan pelatihan melalui Mobile Training Unit berbasis masyarakat yang ada di komunitasnya, maka dilihat dari aspek pengembangan kapasitas hal ini menunjukkan adanya perubahan kesadaran masyarakat yang dapat membawa dirinya menuju kepada kondisi yang lebih berdaya yang berpeluang besar untuk mrnciptakan lapangan kerja sendiri.

2) Analisis Elemen-elemen Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Analisis terhadap elemen-elemen pemberdayaan masyarakat disini tidak secara langsung menilai tingkat capaian atau keluaran masing-masing kegiatan namun lebih mengarah pada dampaknya terhadap pembinaan pelatihan melalui Mobile Training Unit berbasis masyarakat atau perkembangan kapasitas masyarakat pada masing-masing elemen pemberdayaan tersebut.

a. Pemberdayaan Lingkungan

Ditinjau dari aspek pembinaan pelatihan berbasis masyarakat atau pengembangan kapasitas, masyarakat pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat bisa dikatakan telah memiliki kesadaran terkait dengan pembangunan lingkungannya. Pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkungan pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat dilihat dari sisi praktis memang telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinilai mampu mengatasi sebagian permasalahan yang selama ini dirasakan, namun untuk membangun sebuah lingkungan komunitas agar benar-benar tertata dan menjadi komunitas yang lebih maju maka diperlukan suatu konsep penataan lingkungan yang terpadu dan komprehensif. Perencanaan pembangunan yang dimiliki sekarang masih terbatas pada perencanaan jangka menengah atau selama 3 tahun, dan belum terdapat skenario atau konsep pembangunan jangka panjang untuk lingkungan Kabupaten/Kota tersebut, sehingga program-program kegiatan yang muncul sangat dimungkinkan bersifat pragmatis dan tidak berkelanjutan.

b. Pemberdayaan Sosial

Dari keluaran proses perencanaan berupa program yang tersusun, pemberdayaan sosial pada Kabupaten /Kota di Jawa Barat cukup baik karena sebagian besar benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat sebagaimana hasil pemetaan swadaya sebelumnya, namun dokumen perencanaan seharusnya memuat secara lebih detail skenario dan strategi pelaksanaannya.

Aspek pengembangan kapasitas lain dalam pemberdayaan sosial yang lebih utama adalah terjadinya proses pembelajaran bersama masyarakat secara terprogram dan berkelanjutan dan konsep terciptanya proses belajar bersama tersebut dalam satu wadah yaitu komunitasnya. Melalui komunitas tersebut, masing-masing anggota masyarakat dapat saling belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing. Kegiatan-kegiatan pelatihan yang sudah terlaksana melalui Mobile Training Unit pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebagian besar adalah kegiatan yang diprogramkan oleh fasilitator dan bersifat general, sedangkan kegiatan pembelajaran yang murni muncul dari inisiatif masyarakat belum ada, meskipun dari dokumen perencanaan dapat dilihat agenda-agenda pelatihan atau pembelajaran masyarakat cukup banyak. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa komunitas pembelajaran pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat belum efektif dalam memberikan pembelajaran bagi semua anggota komunitasnya.

c. Pemberdayaan Ekonomi

Dilihat dari aspek pengembangan kapasitas, maka bisa dikatakan kondisi masyarakat yang ada sekarang belum banyak mengalami peningkatan kemandirian dalam mendapatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Sasaran dari pemberdayaan ekonomi ini sebenarnya adalah meningkatnya kapasitas masyarakat untuk mengakses peluang-peluang dan mengelola sumber daya perekonomian yang tersedia, melalui pemberian stimulus dan pembinaan usaha secara intensif dan berkelanjutan, maka masyarakat dapat dikatakan berdaya secara ekonomi ketika mereka mampu menjalankan roda perekonomian dalam komunitasnya secara baik, efektif dan efisien. Kondisi semacam itu belum nampak dalam komunitas masyarakat pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat karena keberadaan stimulus yang ada belum dibarengi dengan pembinaan usaha secara terpadu.

d. Pemberdayaan Politik

Pemberdayaan politik sebenarnya bukan merupakan salah satu komponen tersendiri dalam pemberdayaan masyarakat, namun secara implisit hal ini merupakan salah satu elemen penting dalam memberdayakan masyarakat terutama dalam aspek pengembangan kapasitas. Ranah pemberdayaan politik yang dimaksud tidak ada kaitannya dengan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam perpolitikan negara, terlibat dalam partai politik tertentu maupun politik yang berkaitan dengan kepemimpinan kepala daerah. Ranah pemberdayaan politik disini lebih mengarah pada proses pembentukan dan pengelolaan kepemimpinan dalam masyarakat, kelembagaan kolektif masyarakat, proses pengambilan

keputusan, akuntabilitas kelembagaan, channeling, dan meningkatkan posisi tawar masyarakat dalam pembangunan.

Indikator keberdayaan masyarakat dalam ranah politik adalah kondisi dimana masyarakat memiliki kendali dan tanggung jawab penuh terhadap setiap pengambilan keputusan dan perencanaan yang berkaitan dengan pembangunan dalam komunitasnya. Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat saat ini bisa dikatakan telah memiliki peran dan posisi tawar yang cukup baik dalam menentukan apa-apa saja yang menyangkut komunitasnya, hal ini pun didukung oleh pernyataan kepala daerahnya yang selalu mendorong agar masyarakat sama-sama belajar untuk bisa secara bersama-sama mengatasi permasalahan yang dihadapi di daerahnya. Selain kepemimpinan dan pengambilan keputusan, aspek politik lainnya adalah menyangkut informasi, jaringan kerja dan akuntabilitas lembaga. Terkait dengan akses informasi dan jaringan kerja dengan pihak luar, belum banyak kegiatan atau program yang dijalankan meskipun sebenarnya terdapat banyak peluang dan kesempatan yang dimungkinkan. Peluang-peluang yang selama ini belum dimanfaatkan antara lain kerjasama dengan dunia usaha, kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lain serta kerja sama dengan lembaga-lembaga non pemerintah lainnya yang sifatnya memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga keswadayaan masyarakat juga cukup baik, dimana setiap tahun telah ada audit dari pihak auditor eksternal, dilaksanakan review partisipatif dari masyarakat serta pemberian informasi langsung kepada masyarakat baik melalui papan kegiatan maupun media warga. Tingkat akuntabilitas tersebut juga didukung oleh mekanisme pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat. Adanya pengaduan dari masyarakat tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat peduli dan mempunyai rasa memiliki terhadap program pemberdayaan yang ada, sehingga dilihat dari aspek pengembangan kapasitas masyarakat hal ini menunjukkan perkembangan yang baik.

3) Analisis Evaluasi Pelatihan Berbasis Masyarakat

Indikator untuk sebuah komunitas atau masyarakat bisa dianggap berdaya adalah apabila mereka memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengatasi permasalahan dalam komunitasnya sendiri berdasarkan sumber daya yang dimiliki dan mampu mengelola pembangunan dalam komunitasnya secara berkelanjutan. Indikator tersebut sebenarnya lebih mengacu kepada kapasitas masyarakatnya daripada capaian hasil pembangunan yang telah

didapatkan, karena dengan kapasitas masyarakat yang memadai, maka jaminan untuk keberlanjutan pemberdayaan masyarakat bisa lebih dapat diandalkan.

Melihat partisipasi masyarakat Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk turut andil dalam memberikan swadaya baik berupa finansial, material maupun tenaga yang cukup besar maka bisa dikatakan bahwa masyarakat pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat telah mampu mandiri dalam hal pembangunan di lingkungannya. Namun apabila dilihat dari aspek kepentingan umum yang lebih luas maka partisipasi masyarakat tersebut lebih dimotivasi oleh nilai manfaat yang akan mereka dapatkan sendiri. Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya seharusnya lebih termotivasi untuk memberikan kemanfaatan bagi kepentingan umum, utamanya masyarakat miskin sasaran utama dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Evaluasi pembinaan pelatihan melalui Mobile Training Unit berbasis masyarakat dilihat dari keberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu evaluasi yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat selaku actor sebagai pelaku pelatihan dan evaluasi oleh pihak luar dalam hal ini oleh peneliti. Evaluasi oleh masyarakat sendiri lebih bersifat tindakan evaluatif praktis, yaitu evaluasi tentang pelaksanaan siklus pemberdayaan, evaluasi kelembagaan, implementasi atau capaian program yang telah direncanakan. Sedangkan evaluasi oleh peneliti sebagai pihak luar lebih bersifat untuk mengevaluasi proses pemberdayaan yang ada saat ini dari sudut pandang akademis berdasarkan kondisi-kondisi ideal yang diharapkan dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Pada kategori keberdayaan masyarakat sudah mulai memiliki tujuan dan rencana serta basis yang cukup kuat untuk berkembang namun masih sangat perlu meningkatkan kinerja untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi. Pada kategori mandiri masyarakat sudah mulai memiliki gagasan inovatif dan pandangan ke depan, sedangkan pada kategori madani masyarakat sudah memiliki kapasitas yang cukup baik untuk mempertahankan eksistensinya menuju kemandirian dan keberlanjutan. Dalam konteks kemandirian yang sesungguhnya maka seharusnya masyarakat mampu untuk mengakses sumber daya yang dibutuhkan dalam pembinaan pelatihan dan mampu mengelola potensi yang dimiliki sehingga kondisinya maju dari yang ada sebelumnya. Selama ini penyusunan program kegiatan masih cenderung menyesuaikan ketersediaan dana dan dukungan yang ada, utamanya dari pemerintah, sedangkan idealnya program dan kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat disertai strategi dan usaha untuk mencari solusi atas persoalan kebutuhan pendanaan dan kebutuhan sumber daya lainnya.

Sebagaimana disebutkan oleh Wilson (dalam Sumaryadi, 2005) tentang empat tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu tahap awal berupa penyadaran (*awakening*), tahap kedua sudah mengarah kepada pemahaman (*understanding*), tahap ketiga sudah menuju pada ranah pemanfaatan (*harnessing*) dan tahap yang terakhir yaitu menjadikan proses-proses dalam pemberdayaan masyarakat sebagai suatu kebiasaan (*using*), maka perkembangan proses pemberdayaan masyarakat pada Kabupaten/Kota sudah menuju kepada tahap ketiga yaitu pemanfaatan. Setelah masyarakat menyadari dan mengerti tentang pemberdayaan maka mereka memutuskan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya. Untuk dapat dikatakan mencapai tahapan pembiasaan, masyarakat masih membutuhkan lebih banyak pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga dapat dinyatakan siap untuk secara penuh bertanggung jawab di tingkat komunitas atau dalam lingkup Kabupaten/Kota bersangkutan.. Selama ini tingkat ketergantungan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk minta diarahkan oleh fasilitator masih tinggi, dimana ketika peran fasilitator berkurang maka aktivitas dalam masyarakat pun belum benar-benar dapat berjalan secara mandiri.

Ditinjau dari sisi individu masyarakatnya, maka dapat dikatakan berdaya apabila masing-masing individu masyarakat telah memahami konsep pemberdayaan yang ada sehingga dapat tergerak untuk berperan aktif di dalamnya dan lama kelamaan hal tersebut menjadi sebuah budaya dan mendarah daging dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Individu-individu masyarakat pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang selama ini aktif terlibat atau peduli terhadap program pemberdayaan masyarakat masih didominasi oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, aktifis pemuda, perangkat desa dan tokoh perempuan, sedangkan keterlibatan individu lain seperti warga miskin dan kelompok rentan lainnya masih kurang, bahkan bisa dikatakan sedikit sekali terlibat. Untuk mendorong agar proses pemberdayaan bisa melibatkan semua elemen masyarakat terutama meningkatkan pelibatan masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya, maka pembinaan pelatihan melalui Mobile Training Unit yang dilakukan secara terus menerus dan terpadu dengan tetap memperhatikan atau menyesuaikan karakteristik masing-masing individu pada khususnya dan karakteristik komunitas pada umumnya sehingga semua elemen dalam masyarakat dapat terlibat secara penuh dalam pembangunan ditingkat komunitasnya.

4) Analisis Keberlanjutan Program Pembinaan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Keberlanjutan pembinaan pelatihan melalui Mobile Training Unit pada Kabupaten/Kota di Jawa barat juga terkait adanya dukungan dan kerjasama antara

keswadayaan masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga tingkat lainnya. Selama ini dukungan terhadap pelaksanaan pembinaan pelatihan melalui Mobile Training Unit pada Kabupaten/Kota di Jawa cukup baik, sehingga hal tersebut memberikan dorongan untuk keberlanjutan program pembinaan pelatihan melalui Mobile Training Unit berbasis masyarakat yang ada pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat bisa dikatakan siap untuk melanjutkan program pembinaan pelatihan melalui Mobile Training Unit berbasis masyarakat, namun secara mandiri hal tersebut belum dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat, sehingga masih membutuhkan pendampingan yang intensif dari pihak luar dalam hal ini fasilitator agar masyarakat benar-benar siap dan memiliki kapasitas yang cukup untuk secara mandiri mampu menciptakan dan mengelola lapangan kerja sendiri dalam komunitasnya.

Rekomendasi

Berdasarkan kajian literatur dan hasil analisis penelitian yang dilakukan, maka kami menyampaikan beberapa rekomendasi yang terdiri dari rekomendasi studi dan rekomendasi praktis.

1. Rekomendasi Studi

- a. Evaluasi Pembinaan Pelatihan melalui Mobile Training Unit berbasis masyarakat adalah proses pembelajaran yang berkelanjutan sehingga evaluasi tersebut didasarkan pada pengembangan kapasitas masyarakat, sebaiknya dilakukan secara bertahap dimulai dari sebelum program dilaksanakan, awal pelaksanaan program, dan evaluasi periodik setelah pelaksanaan program, untuk itu diperlukan studi lebih lanjut mengenai evaluasi pembinaan pelatihan melalui Mobile Training Unit berbasis masyarakat, terutama dikaitkan dengan tumbuhnya penciptaan lapangan kerja sendiri pada tiap-tiap tahapannya dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
- b. Pemberdayaan masyarakat pada tiap-tiap komunitas adalah bersifat unik atau berbeda antar satu komunitas dengan yang lainnya, untuk itu indikator pemberdayaan masyarakat yang digunakan juga harus menyesuaikan dengan karakteristik komunitas itu dan karakteristik program pembinaan pelatihan melalui Mobile Training Unit berbasis masyarakat yang dijalankan. Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai indikator pemberdayaan masyarakat khusus untuk kasus-kasus tertentu dan indikator-indikator umum untuk semua program pelatihannya.
- c. Lingkup kajian mengenai evaluasi pembinaan pelatihan melalui Mobile Training Unit berbasis masyarakat dan proses pengembangan kapasitasnya yang dilakukan dalam

menciptakan lapangan kerja sendiri, maka penelitian ini adalah program pelatihannya berbasis masyarakat yang dilaksanakan dalam skala daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

2. Rekomendasi Praktis

- a. Masyarakat selaku peserta program pembinaan pelatihan melalui Mobile Training Unit belum sepenuhnya mempunyai keberdayaan dan tingkat kemandirian yang cukup untuk mengelola pengembangan sumber daya manusia dalam komunitasnya, untuk itu peran dan keberadaan fasilitator masih diperlukan dan harus tetap dipertahankan sampai masyarakat benar-benar terbiasa dengan proses-proses kemandirian yang dijalankannya serta telah menjadi budaya bagi masyarakat tersebut.
- b. Perlu adanya penambahan kegiatan-kegiatan dan porsi pembelajaran yang lebih banyak bagi kaum perempuan dalam program pembinaan pelatihan melalui Mobile Training Unit berbasis masyarakat untuk meningkatkan peran dan keterlibatannya dalam lingkungan komunitas pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya.
- c. Pemerintah dan tim fasilitator perlu memfasilitasi terbentuknya *channeling* dan jaringan kerja yang lebih luas antar semua *stakeholder* untuk menjamin keberlanjutan program pembinaan pelatihan melalui Mobile Training Unit berbasis masyarakat khususnya di tingkat komunitas.
- d. Untuk mendukung dan mempercepat pencapaian derajat pembinaan pelatihan menuju masyarakat madani, evaluasi pelatihan yang bisa dilakukan adalah melalui jaringan informasi atau publikasi serta penyebarluasan *best practice* mengenai pemberdayaan masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat benar-benar merasa dekat dan familiar serta merasa menjadi bagian dari program pengembangan kapasitas masyarakat tersebut.
- e. Perlu dirintis jalinan kerjasama secara langsung antara komunitas dengan unsur perguruan tinggi, dimana melalui kerjasama tersebut perguruan tinggi dapat menjalankan misinya untuk pengabdian masyarakat dan masyarakat bisa mendapatkan keuntungannya dengan adanya bantuan pemikiran mengenai komunitasnya.
- f. Perlu dirintis pula jaringan kerjasama secara langsung antara komunitas dengan pihak swasta atau dunia usaha, dimana melalui kerjasama tersebut masyarakat dapat memperoleh manfaatnya dari bantuan baik berupa material maupun finansial, dan pihak swasta bisa menjalankan misinya kepada masyarakat sebagai satu bagian dari tanggungjawab sosial perusahaannya.

Daftar Pustaka

- Adams, Robert, 2003, *Social Work and Empowerment*, New York: Palgrave Macmillan
- Adi, Isbandi Rukminto, 2008, *Intervensi komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers
- Adler, Patricia A dan Adler, Peter, 2009, *Teknik-teknik Observasi*, *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Bartle, Phil, 2007, *Elements of Community Strength*, <http://www.scn.org/mpfc/modules/melin.htm#Measuring>, diunduh pada 4 Nopember 2009..
- Cousins, J. Bradley, 2005, *Will The Real Empowerment Evaluation Please Stand Up?: A Critical Friend Perspective*, *Empowerment Evaluation: Principles in Practice*, New York: The Guilford Press
- Depdiknas, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka
- Departemen Pekerjaan Umum, 2008a, *Pedoman Operasional Umum PNPM Mandiri Perkotaan 2008*
- Departemen Pekerjaan Umum, 2008b, *Review Partisipatif: Modul Khusus Fasilitator (F24) Pelatihan Madya I*
- Fetterman, David and Wandersman, Abraham, 2007, *Empowerment Evaluation: Yesterday, Today, and Tomorrow*, *American Journal of Evaluation* 2007; 28; 179
- Fontana, Andrea dan Frey, James H, 2009, *Wawancara Seni Ilmu Pengetahuan*, *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Foy, Nancy, 1994, *Empowering People at Work*, London: Grower Publishing Company
- Fujikake, Yoko, 2008, *Qualitative Evaluation: Evaluating People's Empowerment*, *Japanese Journal of Evaluation Studies*, Vol 8 No 2, 2008, pp 25 – 37, Japan Evaluation Society.

Biodata

Prof. Dr.H. Ali Anwar Yusuf, M.Si.
Guru Besar UNPAS Bandung